



PERAN *UN WOMEN* DALAM ISU KETIDAKSETARAAN GENDER DI PAKISTAN

^{1*}Kinanti Diah Ayu Setyowati, ²Andini Aulia Fitriyanti, ³Prilla Marsingga

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Surel: 2210631260008@student.unsika.ac.id

Tanggal pengiriman: 22 Oktober 2023 | Tanggal revisi: 19 Februari 2024 | Tanggal diterima: 15 Maret 2024

ABSTRACT

In 1994, UNDP released a report on human security, which included a point on personal security. The issue of gender inequality is a threat to personal security. Pakistan is a country that continues to advocate for and work towards gender equality. Inequalities in socio-economic development and the influence of a social structure based on a feudal system led to differences in the level of gender inequality in Pakistan. The high level of gender inequality in Pakistan affects women's ability to fully enjoy their rights. Using the concepts of international organizations, human security theory, and gender equality, this research aims to examine the role of the international organization UN Women in increasing gender equality in Pakistan. Employing a qualitative method with a descriptive approach as the framework, this research found that UN Women serves as a facilitator, communicator, and motivator in advancing gender equality, promoting Sustainable Development Goal 5, and protecting women from violence and discrimination. UN Women actively plays a role in achieving gender equality in Pakistan.

Keywords: Pakistan, Gender Inequality, UN Women, South Asia, Sustainable Development Goals

ABSTRAK

Pada 1994, UNDP menerbitkan laporan tentang keamanan manusia, di mana salah satu poin di dalamnya ialah tentang keamanan personal. Isu ketidaksetaraan gender termasuk dalam kategori ancaman terhadap keamanan personal. Pakistan masih berjuang dalam mewujudkan kesetaraan gender. Ketidakmerataan dalam pembangunan sosial dan ekonomi dan pengaruh dari struktur sosial yang didasarkan pada sistem feodal menyebabkan perbedaan dalam tingkat ketidaksetaraan gender di Pakistan. Dengan menggunakan konsep organisasi internasional, teori keamanan manusia dan konsep kesetaraan gender, penelitian ini mengkaji peran organisasi internasional *UN Women* dalam meningkatkan kesetaraan gender di Pakistan. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian menemukan bahwa *UN Women* berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator dalam meningkatkan kesetaraan gender, mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-5, mendorong pemberdayaan perempuan, dan melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. *UN Women* berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan di Pakistan.

Kata Kunci: Pakistan, Ketidaksetaraan Gender, *UN Women*, Asia Selatan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Isu ketidaksetaraan gender terus menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai dan tetap menjadi fokus perjuangan. Gender di sini bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih kepada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda di antara keduanya (Gusmansyah, 2019). Ketidaksetaraan gender (*gender equality*) merupakan fenomena di mana sistem dan struktur sosial masyarakat memperlakukan perbedaan perilaku berdasarkan gender. Isu ketidaksetaraan gender menjadi salah satu isu keamanan manusia (*human security*) yang masih berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan laporan *The World Economic Forum's Global Gender Gap Index* tahun 2023, kawasan Asia Selatan (63,4%) melampaui Timur Tengah dan Afrika Utara (62,6%), sebagai kawasan yang paling jauh dari kesetaraan gender. Pakistan menjadi salah satu negara yang masih memiliki isu ketidaksetaraan gender di wilayah Asia Selatan. Dalam *The Global Gender Gap Index Ranking* tahun 2023, Pakistan menempati peringkat ke-142 dari 146 negara yang terdaftar (World Economic Forum, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Pakistan memiliki tingkat kesetaraan gender yang rendah, termasuk dalam hal mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan partisipasi politik.

Permasalahan ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan di Pakistan merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan kemajuan sosial individu, khususnya perempuan di negara tersebut. Banyak perempuan Pakistan yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses hak-hak dasar yang dimilikinya. Misalnya dalam mengakses pendidikan, sering kali perempuan mengalami ketidaksetaraan kesempatan dengan laki-laki. Akibatnya, mereka terbelakang dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja (Paynter, 2018). Selain itu, ketidaksetaraan gender juga terlihat dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, di mana

perempuan biasanya menerima pelayanan yang kurang baik daripada laki-laki (Ali, 2022). Tidak hanya itu saja, perempuan Pakistan juga dibatasi dalam berpartisipasi politik dan biasanya tidak diterima untuk menjabat sebagai pimpinan (Anees, 2023).

Di antara banyak faktor yang saling berkorelasi, masalah utama terjadinya ketidaksetaraan gender ini dikarenakan adanya tradisi patriarki yang kuat dan masih mendominasi masyarakat Pakistan, di mana pandangan bahwa laki-laki lebih superior dan memiliki kontrol atas perempuan masih sangat kental (Ahmed, 2016). Hal ini terlihat dari adanya praktik *honor killing*, yaitu pembunuhan secara sengaja dengan tujuan untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga (Azizah & Rahmawati, 2020). Lalu, kasus *women child marriage* yang menghilangkan hak anak perempuan atas masa kanak-kanak yang aman dan sehat serta pendidikan yang berkualitas dan lengkap (UN Women, 2020). Kemudian, tragedi Malala Yousafzai, yang mendapat ancaman dan intimidasi ketika memperjuangkan hak perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan (BBC News, 2013).

Sistem sosial, ekonomi, dan politik di Pakistan sering kali mendiskriminasi perempuan. Ketidaksetaraan dalam pendidikan, peluang pekerjaan, dan partisipasi politik menciptakan ketidaksetaraan dalam struktur masyarakatnya (Khan, 2013), bahkan tidak jarang perempuan mengalami kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual, terutama saat pandemi COVID-19, yang berdampak pada peningkatan kekerasan domestik. Hal ini membuktikan bahwa keadaan darurat nasional dan situasi krisis global dapat memperburuk kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan (UNODC, 2020). Demikian, permasalahan ini membentuk lingkungan yang tidak mendukung perkembangan dan pemberdayaan perempuan di Pakistan.

Dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender yang terjadi, pemerintah Pakistan telah mengadopsi beberapa komitmen internasional, terutama melalui hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

Women (CEDAW). Pada tahun 1996, Pakistan menyetujui CEDAW dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan berbagai jenis kekerasan berbasis gender lainnya yang dilakukan oleh aktor swasta maupun agen negara (Human Rights Watch, 1999). Sebagai bentuk dukungan dalam implementasi CEDAW, pemerintah Pakistan membentuk Komisi Penyelidikan Perempuan yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam menangani kasus *honor killing*, serta untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan di Pakistan (NCSW, 2000). Namun sayangnya, komisi tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap isu ketidaksetaraan gender yang terjadi.

Selain itu, melalui badan Konstitusi Pakistan, pemerintah Pakistan sudah memberikan perlindungan terkait hak-hak perempuan melalui Undang-Undang Nasional tahun 1973. Dalam Konstitusi Pakistan, Pasal 25 menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan memastikan bahwa warga negara memiliki hak yang sama dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pasal 27, melarang adanya diskriminasi berdasarkan struktur sosial, kepercayaan, atau jenis kelamin. Selain itu, konstitusi juga memberikan tempat bagi perempuan Pakistan di Majelis Nasional untuk memilih. Lalu, Pasal 32 dan 34, yang mengatur partisipasi penuh perempuan di semua bidang (Elashi dalam Konstitusi Pakistan, 1973).

Namun, pada kenyataannya, pengimplementasian CEDAW di Pakistan masih belum efektif, terutama dalam mengatasi tradisi *honor killing* yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Pakistan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pembunuhan demi kehormatan di Pakistan, namun hanya sekitar 10-20% yang dilaporkan dan mendapat hukuman. Lalu, masih banyak perempuan di Pakistan yang masih belum merasakan perlindungan apa pun dari pemerintah Pakistan (Chairani, 2018). Meskipun, undang-undang pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan sudah ada di tingkat nasional dan daerah, sayangnya, dalam

implementasinya masih lemah. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan menjadikan undang-undang ini kurang efektif (Sulaimah, 2022). Maka dari itu, peran organisasi internasional dibutuhkan dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender di Pakistan.

Melalui organisasi internasional, upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang gagal dikelola oleh program pemerintah, seperti dalam contoh kasus *honor killing*, dapat diatasi oleh organisasi internasional yang berkolaborasi dengan pemerintah (Astuti & Rodiah, 2023). Sebagai organisasi internasional yang bergerak pada permasalahan pemberdayaan perempuan, *UN Women* dapat memberikan edukasi dan panduan penting bagi masyarakat untuk mendefinisikan perempuan sebagai pihak yang berdaya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional (UN Women, 2013). Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2030 juga dapat terwujud melalui kerja sama antara *UN Women* dan pemerintah Pakistan. Terutama pada SDGs nomor 5 yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan guna mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mendorong pemberdayaan mereka, serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai program, proyek, atau inisiatif yang telah dilakukan oleh *UN Women* dalam rangka memerangi fenomena ketidaksetaraan gender di Pakistan. Hal tersebut memerlukan analisis efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh *UN Women* serta bertujuan untuk mengevaluasi dampak positif atau perubahan yang telah terjadi di Pakistan sebagai keberhasilan dari peran *UN Women*. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam kebijakan, kesadaran masyarakat, atau kondisi perempuan dan anak perempuan di Pakistan. Penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu ketidaksetaraan gender di Pakistan dan peran *UN Women* dalam mengatasi isu tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan sebuah entitas formal dan berkelanjutan yang terbentuk melalui kesepakatan antara (minimal) dua negara berdaulat, baik melalui perwakilan pemerintah maupun non-pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Archer, dalam *International Organization*, mengklarifikasi tiga peran utama dalam organisasi internasional. *Pertama*, organisasi internasional sebagai alat yang digunakan oleh negara anggotanya untuk mengadvokasi kepentingan nasional negara mereka. *Kedua*, organisasi internasional sebagai forum bagi negara anggotanya untuk berdiskusi dan merundingkan isu-isu yang dihadapi negara anggotanya. *Ketiga*, organisasi internasional sebagai aktor independen yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh aktor internasional lainnya (Archer, 2001).

Menurut penulis, konsep organisasi internasional memiliki relevansi yang berpengaruh terhadap isu ketidaksetaraan gender yang terjadi. Organisasi internasional sebagai aktor independen dapat berfungsi sebagai pembela dan pendorong perubahan dalam isu ketidaksetaraan gender di Pakistan. Dengan memiliki otonomi, organisasi internasional dapat memberikan tekanan moral dan diplomasi kepada Pakistan untuk meningkatkan komitmen dan implementasi dalam mengatasi isu ketidaksetaraan gender.

Teori *Human Security*

Teori *human security* adalah salah satu aliran teori kritis yang muncul karena menyadari bahwa keamanan individu memiliki tingkat yang sama penting dengan keamanan negara serta menentang realisme yang menentukan objek penelitiannya hanya sebatas negara. *Human Development Report* tahun 1994 menyebutkan keamanan personal (*personal security*) terdiri dari berbagai ancaman terhadap keselamatan

individu, seperti kekerasan, pelecehan, diskriminasi, tindakan intimidasi, dan lain sebagainya (UNDP, 1994). Dengan kata lain, *human security* menekankan pada pentingnya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional dan internasional. Konsep *human security* memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong organisasi internasional dan aktor non-pemerintahan maupun entitas lainnya dalam mengatasi isu *human security*.

Menurut penulis, kondisi ketidaksetaraan gender di Pakistan telah menciptakan tantangan besar terhadap keamanan individu, khususnya perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Pakistan sering kali menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi. Oleh karena itu, konsep *human security* menjadi relevan dalam mengatasi isu tersebut dengan berfokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan individu, khususnya perempuan, dari ancaman terkait keamanan manusia. Dasar ini menjadi pijakan kebijakan untuk menjaga hak-hak dasar perempuan, menciptakan lingkungan bebas kekerasan, dan mempromosikan kesetaraan akses dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan sehingga menjadi solusi nyata menghadapi tantangan ketidaksetaraan gender di Pakistan.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama dan memiliki kesempatan yang setara dalam mewujudkan hak-hak asasi dan potensi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan di semua aspek kehidupan. Menurut *United States Agency for International Development* (USAID), kesetaraan gender terwujud ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak yang seimbang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sebagai individu yang merdeka (Puspitawati, 2013).

Menurut penulis, dalam isu ketidaksetaraan gender di Pakistan, konsep kesetaraan gender berperan dalam memberikan gagasan adanya kesetaraan hak,

kesempatan, dan perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gagasan ini menjadi fondasi utama dalam mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan Pakistan. Kesetaraan gender membantu mengubah norma dan struktur sosial yang membatasi kemajuan perempuan serta memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang setara untuk tumbuh dan memberikan kontribusi secara penuh dalam masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mengutamakan analisis, observasi, dan pemahaman terhadap fenomena sosial, yang kemudian diinterpretasikan dan dijelaskan melalui kata-kata. Objek dari metode penelitian ini memusatkan pada manusia, hubungan antarpribadi, dan dinamika interaksi (McCusker & Gunaydin, 2015). Penulis juga menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, artikel jurnal, pencarian daring, dan dokumen yang memiliki validitas yang dapat dipercaya. Data tersebut dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu dan kemudian dianalisis secara cermat untuk menyusun penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada analisis data yang terkait dengan isu ketidaksetaraan gender di Pakistan, dengan menelaah faktor-faktor sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat yang memengaruhi fenomena tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif dalam memaparkan analisis penelitiannya. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang lebih mengarah kepada analisis fenomena yang sudah ada dengan menggunakan teori sekaligus konsep yang dijelaskan sebelumnya (Sugiyono, 2013). Pendekatan deskriptif digunakan penulis dalam menguraikan secara teliti dan terperinci mengenai isu ketidaksetaraan gender, dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan pada isu tersebut.

DISKUSI

Kondisi Isu Ketidaksetaraan Gender di Pakistan

Pencapaian SDGs, terutama SGD 5, telah menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Pakistan. Di kawasan Asia Selatan, Pakistan masih berjuang untuk mengimplementasikan SDGs secara efektif, khususnya dalam mencapai kesetaraan gender. Dalam hal ini, Pakistan berada di posisi ke-125 dari 163 negara dalam indeks pelaksanaan SDGs, yang mana menunjukkan keteringgalannya dalam mencapai tujuan ini (UNSDG, 2023). Pakistan menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat implementasi SDGs, seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, di mana sebagian besar masyarakat hidup di bawah ambang kemiskinan. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi hal yang sulit, terutama di wilayah pedesaan, yang akhirnya menjadi penyebab ketimpangan sosial yang semakin meningkat (Ali, 2023).

Berdasarkan *National Report on the Status of Women in Pakistan 2023*, kesenjangan gender di Pakistan banyak terjadi dalam hal mengakses pendidikan dan tingkat literasi yang rendah. Diperkirakan 22,8 juta anak usia 5-16 tahun di Pakistan adalah anak-anak putus sekolah. Sebanyak 53 persen perempuan berusia 15-64 tahun menyatakan bahwa mereka tidak pernah bersekolah dibandingkan dengan 33 persen laki-laki pada rentang usia yang sama (UN Women, 2023). Kemiskinan dan status ekonomi yang rendah serta hambatan sosial budaya menjadi faktor utama kesenjangan gender dalam mengakses pendidikan, seperti yang terlihat dari rendahnya partisipasi dan tingginya angka putus sekolah pada anak perempuan. Hal ini akan menimbulkan peningkatan kasus *women child marriage* pada perempuan dan anak perempuan di Pakistan. Diperkirakan bahwa 18 persen perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan 4 persen di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Di sisi lain, sekitar 5 persen laki-laki juga menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (UNICEF, 2023).

Women child marriage termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada kedua gender dan berdampak pada anak perempuan secara tidak proporsional (UNICEF, 2022). Salah satu dampak tidak proporsional yang dialami anak perempuan adalah KDRT. Perempuan Pakistan mengalami tekanan psikologis, kendali, serta dominasi dari pasangan mereka yang sering kali memiliki kontrol atas keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga (Azizah & Rahmawati, 2020). Akibatnya, tidak jarang berbagai tindak KDRT baik fisik maupun non-fisik dialami perempuan Pakistan. Pola pikir tradisional tersebut justru membawa permasalahan kekerasan berbasis gender, yang juga tidak dapat diselesaikan karena masyarakat mendukung adanya superioritas terhadap laki-laki. Norma sosial di masyarakat Pakistan telah menginternalisasi kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang umum dan diterima (Yusalia, 2014, p. 198). Menurut Kusman D. A. (Tirto, 2022), hal ini diperparah pula oleh kondisi lemahnya lembaga berwajib, yang pada kasus ini adalah kepolisian, dalam menerapkan sanksi untuk pelaku. Ini terjadi karena pelaku kekerasan umumnya adalah anggota keluarga atau orang terdekat dengan korban sehingga memberikan hambatan yang signifikan dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Di sisi lain, peran ekonomi dan kemiskinan juga mengambil alih pengambilan keputusan pernikahan anak. Sebagian orang tua menganggap bahwa membesarkan anak perempuan sebagai beban finansial. Mereka menilai bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu lagi membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak perempuan mereka (Kakal et al., 2023, p. 5). Selain itu, pernikahan anak diyakini oleh sebagian masyarakat Pakistan sebagai strategi untuk melindungi anak perempuan dari pelecehan seksual dan kawin lari (Kakal et al., 2023, p. 6). Oleh karena itu, sebagian kaum muda, terutama perempuan, tidak memiliki banyak ruang untuk mengambil keputusan atas pernikahan mereka.

Terbatasnya ruang dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan adanya diskriminasi. Dalam bidang ekonomi, perempuan Pakistan mengalami sejumlah tindakan diskriminatif karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Menurut *International Growth Center*, perempuan Pakistan mengalami kesenjangan upah antargender, di mana laki-laki dibayar lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan pekerjaan tidak menjelaskan kesenjangan gender dalam gaji yang diberikan. Untuk persyaratan pendidikan yang sama, daftar pekerjaan yang mengutamakan kandidat laki-laki rata-rata menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan daftar pekerjaan yang mengutamakan kandidat perempuan. Dengan perbedaan gaji rata-rata sebesar 33 persen, kesenjangan upah berdasarkan gender merupakan yang tertinggi untuk pekerjaan yang membutuhkan kandidat berpendidikan perguruan tinggi. Seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, rata-rata gaji yang ditawarkan oleh lowongan pekerjaan yang terbuka bagi kandidat laki-laki dan perempuan juga meningkat, sementara kesenjangan gender pun juga ikut meningkat (International Growth Center, 2021).

Beberapa faktor yang saling berhubungan bertanggung jawab atas rentannya lapangan kerja bagi perempuan, termasuk kurangnya pendidikan dan informasi yang membuka peluang kerja formal; pembatasan bekerja di luar rumah; norma sosial, budaya, dan agama yang membatasi perempuan pada beberapa pekerjaan dan sektor; risiko keselamatan dan keamanan; dan kurangnya layanan transportasi yang aman dan memadai (UN Women, 2023). Situasi ini membatasi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, meningkatkan pemberdayaan keuangan mereka serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan.

Tidak terkecuali pula, partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan Pakistan sering kali tidak diizinkan untuk menggunakan hak suaranya di wilayah yang didominasi oleh suku-suku (Azizah & Rahmawati, 2020). Seperti kebanyakan negara lain, kesenjangan gender terbesar di Pakistan terletak pada pemberdayaan

politik (15,2%). Negara ini telah memiliki kepala negara perempuan selama 4,7 tahun dalam 50 tahun terakhir, dan sepersepuluh menteri serta seperlima anggota parlemen adalah perempuan (World Economic Forum, 2023). Namun, dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu berlaku. Karena kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki dan struktur sosial yang tidak mendukung keterlibatan perempuan Pakistan, jumlah perwakilan perempuan di pemerintahan negara tersebut menjadi terbatas.

Beberapa kasus kekerasan politik terhadap perempuan di Pakistan mencakup insiden tragis seperti pembunuhan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto pada tahun 2007. Bhutto menjadi korban kekerasan politik yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di dunia politik. Seorang aktivis hak-hak perempuan dan Menteri Kesejahteraan Sosial Punjab, Zille Huma Usman, juga menjadi korban pembunuhan di depan umum pada tahun yang sama (Elashi, 2014). Beberapa kasus lainnya, menunjukkan adanya hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, seperti larangan perempuan untuk memilih dan ancaman terhadap mereka, terutama di provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa (Elashi, 2014). Kasus-kasus seperti ini, menunjukkan adanya tantangan serius yang dihadapi perempuan dalam mencapai partisipasi politik yang setara di Pakistan.

Demikian, pembangunan sosial-ekonomi yang tidak merata merupakan hasil dari struktur sosial suku feodal, yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta membuat kondisi ketidaksetaraan gender di Pakistan menjadi beragam. Mobilitas kehidupan perempuan terhambat oleh aspek masyarakat feodal yang didominasi oleh kaum pria. Banyak hal di mana perempuan tertinggal, terutama dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, terjadi ketidakseimbangan hak pada setiap individu, di mana isu gender masih menjadi masalah bagi sistem pemerintahan Pakistan (Kristina, 2013). Meskipun, Pakistan memiliki serangkaian undang-undang, ketentuan dan kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kepentingan sosial-ekonomi dan politik mereka. Namun, dalam penerapan strategi

yang direncanakan ini masih menghadapi tantangan. Peningkatan yang mengkhawatirkan telah terlihat dalam insiden kekerasan terhadap perempuan selama beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi tanda tanya terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaganya (Khan, 2021).

Peran *UN Women* dalam Isu Ketidaksetaraan Gender di Pakistan

Sejak penerimaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declarations of Human Rights/UDHR*) oleh pemerintah Pakistan, UDHR dianggap sebagai sumber inspirasi dan membuka jalan bagi perjanjian-perjanjian tambahan yang masih berlaku secara permanen di tingkat global maupun regional. Salah satu contohnya adalah CEDAW, yang disetujui oleh pemerintah Pakistan pada tahun 1996 (Pemerintah Pakistan Kementerian Hak Asasi Manusia, 2022). Penandatanganan CEDAW menunjukkan komitmen pemerintah Pakistan untuk bertanggung jawab dan melindungi perempuan dari kekerasan seksual serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Namun, pemerintah Pakistan masih menghadapi kendala dalam pengimplementasiannya, terutama karena masih adanya pemikiran patriarki yang kuat di masyarakat Pakistan.

Dalam upaya menangani ketidaksetaraan gender di Pakistan, partisipasi organisasi internasional menjadi penting. Salah satunya adalah *UN Women*, sebuah entitas di bawah mandat PBB, yang terfokus pada pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan, serta turut serta dalam mencapai SDGs, khususnya SDG 5 tentang pemberdayaan perempuan (UN Women, n.d.). *UN Women* memainkan peran strategis dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan gender di Pakistan melalui berbagai program, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, aksi kemanusiaan, partisipasi generasi muda, perencanaan tingkat nasional, dan pembangunan berkelanjutan (Sulaimah, 2022).

Dalam hal ini, peran *UN Women* bukan hanya sebagai instrumen, melainkan juga sebagai kontributor yang membantu Pakistan mencapai kepentingan nasionalnya dalam menangani ketidaksetaraan gender.

Di sisi lain, menurut penulis, kondisi ketidaksetaraan gender di Pakistan telah berdampak besar pada keamanan individu, terutama perempuan. Perempuan Pakistan sering kali menjadi korban tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan, tidak jarang pula, pelanggaran hak asasi manusia dialami perempuan Pakistan. Tradisi seperti *honor killing* dan *women child marriage* juga menimpa hak-hak perempuan dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesenjangan upah menjadi tantangan tambahan yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, peran *UN Women* dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Pakistan secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip *human security*, yang berfokus untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan individu, khususnya perempuan, dari berbagai ancaman terhadap hak-hak mereka.

Sementara itu, kesetaraan gender adalah gagasan yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak peduli dengan jenis kelaminnya, serta memberikan penekanan pada prinsip kesetaraan dalam hak dan peluang. *UN Women*, sebagai badan PBB yang menekankan pada masalah kesetaraan gender, memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. *UN Women* berusaha menghilangkan hambatan yang mencegah laki-laki dan perempuan mendapatkan hak, sumber daya, dan peluang yang sama (UN Women, n.d.). Dalam hal ini, *UN Women* melakukan berbagai cara, termasuk mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, *UN Women* berusaha untuk mengubah norma sosial dan budaya yang membatasi perempuan

serta memperkuat kapasitas perempuan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Pakistan (UN Women, 2015).

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *UN Women*, upaya internasional telah ditujukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Dua fokus utama dari upaya ini adalah eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Selain itu, target kedua adalah menghapuskan praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan mutilasi genital perempuan (UN Women, 2015). Kedua target ini ditempatkan dalam kategori prioritas utama (*Tier 1* dan *Tier 2*) dalam kerangka *UN Women* (UN Women, 2015).

Penelitian yang dilakukan *UN Women* mengkaji dua target ini karena keduanya dianggap sangat penting dan mendesak dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Target-target ini mencerminkan komitmen *UN Women* untuk memberikan perlindungan dan hak-hak perempuan dengan mengatasi tantangan-tantangan yang paling mendesak dalam masyarakat saat ini, seperti perdagangan manusia dan praktik-praktik tradisional yang merugikan perempuan (UN Women, 2015). Oleh karena itu, peneliti memusatkan perhatian pada sasaran-sasaran ini dalam konteks upaya global untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan.

Sebuah organisasi yang kuat harus memiliki program-program kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuannya. *UN Women* telah mengimplementasikan program-programnya di Pakistan dan membentuk kerangka kerja regional. Program-program *UN Women* melibatkan berbagai aspek, termasuk undang-undang, kebijakan, tindakan nyata, layanan masyarakat, dan pelaksanaan inisiatif tertentu. Selain itu, *UN Women* juga berkolaborasi secara strategis dengan entitas di sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, serta lembaga akademik untuk memperkuat dan mengadvokasi

program ini (UN Women, 2015). *UN Women* memiliki fokus khusus pada program-program dalam beberapa bidang yang terkait dengan isu kesetaraan gender di Pakistan, yang mencakup:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO), kekerasan terhadap perempuan memiliki konsekuensi yang mengerikan baik secara instan maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Efek jangka pendek termasuk trauma fisik dan trauma psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan masalah tidur. Dalam jangka panjang, kekerasan ini menghambat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial, dengan dampak pada penurunan kualitas hidup, pendapatan, dan pendidikan anak-anak (World Health Organization, 2013). Biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak kekerasan ini juga signifikan, termasuk biaya perawatan kesehatan dan hukum, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam mengatasi masalah ini, dukungan kuat dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan, termasuk pendirian pusat krisis, perbaikan sistem peradilan, dan pendidikan kesetaraan gender, semuanya disertai perubahan budaya yang mendukung penghapusan kekerasan dan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh (United Nations, 2019).

Salah satu contoh kasus nyata perempuan di Pakistan yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak aman dan berupah rendah adalah kasus yang dialami oleh Zeema Khatoon, seorang ibu lima anak dari Desa Meeran Pur, utara Karachi, yang bekerja di ladang kapas di Provinsi Sindh. Meskipun pernah mendapatkan upah yang lebih tinggi pada tahun sebelumnya, Khatoon sekarang harus bekerja berlama-lama di bawah terik matahari hanya untuk memperoleh 2 dolar AS per hari, di bawah pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai 3,5 dolar AS atau setara dengan 46 ribu rupiah. Khatoon dan sesama pekerja ladang kapas yang mayoritas buta huruf sering menjadi korban pemotongan gaji oleh majikannya karena ketidakmampuan mereka

menghitung. Di samping itu, para pekerja wanita ini juga terancam menjadi korban pelecehan seksual oleh atasan mereka. Dari sekitar setengah juta pekerja di ladang kapas, hampir seluruhnya mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan dari majikan mereka (Koran Sindo, 2014).

Dalam situasi ini, banyak perempuan di Pakistan, terutama di perkotaan, bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja domestik. Hal ini juga berdampak pada kesulitan perempuan dalam mengejar peluang ekonomi yang lebih besar karena mereka seringkali harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga yang tidak terbayar (UN Women, 2017).

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di Pakistan, *UN Women* membentuk program *Women's Economic Empowerment* (WEE), di mana program ini berfokus pada keterlibatan pekerja perempuan dan bisnis milik perempuan di berbagai wilayah di Pakistan, dengan menyediakan sumber daya dan layanan yang diperlukan agar dapat berkembang secara ekonomi. Program WEE memobilisasi setidaknya 1.500 pekerja perempuan dan bisnis milik perempuan, khususnya di distrik Multan dan Sialkot di Punjab. Selain itu, program ini berupaya membentuk kelompok-kelompok fungsional di antara para perempuan ini, yang memungkinkan mereka berkolaborasi dan berbagi sumber daya dan pengetahuan secara efektif serta meningkatkan kapasitas, termasuk instruksi, untuk mengelola dompet keuangan seluler, yang akan memungkinkan orang untuk mendapatkan layanan keuangan (UN Women, 2022).

Program WEE ini juga selaras dengan komitmen Pakistan terhadap SDGs, khususnya SDGs 5. SDGs 5 berfokus untuk “mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan” dan menetapkan target ini sebagai dasar untuk mencapai “pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pembangunan sosial, dan meningkatkan kinerja bisnis” (UNSDGS, 2019). Dalam hal ini, SDGs 5 menekankan kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi utama yang membuka pintu bagi kemajuan yang berarti untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di tingkat kebijakan, *UN Women* bekerja sama dengan kementerian terkait Pakistan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan dan undang-undang yang responsif terhadap gender. Upaya ini telah menghasilkan pembentukan Undang-Undang Pekerja Rumahan Provinsi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas provinsi, dan regulasi terkait perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja. Selain itu, *UN Women* juga bermitra dengan pemerintah federal Benazir dalam Program Bantuan Pendapatan untuk mengadvokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan (UN Women, 2020).

Lalu, pada tingkat komunitas, *UN Women* berupaya memberdayakan perempuan, dengan perhatian khusus pada kelompok yang paling terpinggirkan dan terpinggirkan, yang tinggal di daerah pedesaan, terbelakang, dan sulit dijangkau, khususnya usaha mikro, pekerja berbasis rumahan, dan perempuan dengan keterampilan rendah. Untuk meningkatkan kelayakan kerja dan mata pencaharian mereka melalui peluang pelatihan teknis yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pasar, program peningkatan kapasitas berfokus pada keterampilan yang dapat dipasarkan, kewirausahaan, literasi keuangan, pemberdayaan digital, dan pengembangan bisnis. *UN Women* juga memfasilitasi hubungan dengan pasar dan rantai pasokan bernilai tinggi (UN Women, 2020).

Demikian, *UN Women* bekerja sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan keterampilan perempuan sehingga mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih sesuai dan memiliki pengaruh terhadap lembaga dan regulasi publik yang memengaruhi kemajuan dan pertumbuhan. Dalam mencapai tujuan perempuan yang paling membutuhkan bantuan, seperti pekerja rumah tangga, migran, perempuan dengan disabilitas, program pemberdayaan ekonomi *UN Women* melibatkan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil (UN Women, 2021). Tujuannya

adalah untuk meningkatkan pendapatan, akses, dan kendali atas sumber daya, serta meningkatkan keamanan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan.

2. Mengakhiri tindakan *gender-based violence* (GBV)

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women/DEVAW*) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1993, terjadi kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Deklarasi ini menegaskan hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan mengakui perlunya tindakan kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Selain itu, *UN Women* juga menjalankan program dan proyek di banyak negara untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan tindakan nyata dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini melibatkan pendidikan dan pelatihan bagi pihak berwenang dan masyarakat tentang hak-hak perempuan, dukungan kepada korban kekerasan, serta peningkatan akses ke pelayanan kesehatan dan hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan (UN Women, n.d). Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam penerapan langkah-langkah tersebut dan dalam memastikan perlindungan dan hak perempuan di seluruh dunia.

Dalam upaya mengatasi tindakan *gender-based violence* (GBV) terhadap perempuan, *UN Women* membentuk program *Essential Services Program* (ESP), program global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar bagi korban kekerasan berbasis gender, termasuk layanan medis, hukum, dan psikososial. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara *UN Women*, UNFPA, WHO, UNDP, dan UNODC. Di Pakistan, *UN Women* telah meluncurkan program ini dengan fokus pada layanan sosial untuk para korban kekerasan. Program ini diidentifikasi sebagai layanan penting yang harus disediakan oleh pemangku kepentingan di sektor kesehatan, layanan sosial, kepolisian, dan peradilan. Melalui serangkaian pedoman, program ini bertujuan

untuk meningkatkan koordinasi dalam menyediakan layanan-layanan penting tersebut di Pakistan (UN Women, 2019).

Selain itu, *UN Women* Pakistan juga bekerja di beberapa bidang untuk mencegah lingkaran setan kekerasan terhadap perempuan. *UN Women* melipatgandakan kekuatan strategi inovatifnya melalui kampanye advokasi dan kemitraan erat dengan semua tingkatan pemerintahan, kelompok perempuan, dan cabang lain dari sistem PBB. *UN Women* telah memimpin dalam membuat konsep, membangun, dan memfasilitasi aliansi *Eliminating Violence Against Women* yang dikenal sebagai *EVAW Alliance Group*. Kelompok ini terdiri dari aktor pemerintah dan non-pemerintah serta aktor bilateral. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan dan memperkuat intervensi agar mendapatkan hasil yang produktif dan efektif dalam memerangi ancaman kekerasan terhadap perempuan di Pakistan (UN Women, n.d.).

3. Menyelenggarakan aksi kepedulian terhadap kemanusiaan

Ketika krisis terjadi, dampaknya bisa sangat cepat dirasakan dalam kehidupan manusia. Kematian, pengusiran, dan kerusakan infrastruktur mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak dari segala rentang usia. Dalam situasi krisis, jenis kebutuhan, sumber daya, kemampuan, dan strategi menjadi sangat nyata (UN Women, 2015). Perempuan sering kali menjadi kelompok yang pertama kali terpuak oleh krisis dan memegang peran penting dalam kelangsungan hidup serta adaptasi dalam konteks sosial yang sulit.

UN Women memiliki peran dalam penanganan dan mitigasi konflik melalui serangkaian langkah yang membantu negara-negara anggota dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengembangan kebijakan dan program di lapangan melalui inisiatif *Women Leadership, Empowerment, Access and Protection in Crisis Response* (LEAP) (UN Women, 2015). LEAP dikembangkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam respons terhadap krisis baik di tingkat lokal maupun internasional. Program

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk melindungi hak-hak mereka dalam situasi darurat dan berpartisipasi secara aktif dalam respons terhadap krisis. Program LEAP ini merupakan salah satu inisiatif program andalan *UN Women* yang dirancang untuk memastikan bahwa *UN Women* dapat melaksanakan SDGs. Program ini juga mendukung pemerintah nasional untuk mengatasi berbagai target SDG di berbagai tujuan (UN Women, 2015).

Selain itu, dalam mempromosikan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan serta memperkuat pembangunan perdamaian dan stabilitas di Pakistan, *UN Women* membentuk program *Women and Peace* (UN Women, 2009). Program ini dirancang dan dijalankan dengan bantuan mitra lokal, pemerintah Pakistan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga lainnya. Dalam konteks Pakistan, *UN Women* juga bekerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Pakistan untuk memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan implementasi proyek-proyek yang berkaitan dengan gender dan perdamaian. Program ini merupakan bagian dari upaya lebih luas *UN Women* untuk memperkuat peran perempuan dalam perdamaian dan rekonsiliasi, serta untuk mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif di negara tersebut (UN Women, 2022).

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan program tersebut yang terletak pada perjuangan keseluruhan untuk kesetaraan gender di Pakistan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian, misalnya, terkait dengan partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial di Pakistan. Dalam penerapannya, diperlukan komitmen serius dari para pembuat kebijakan dan perwakilan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender yang lebih besar. Mengakui peran perempuan dalam pembangunan perdamaian, memperkuat suara mereka dalam masalah perdamaian dan keamanan, membangun ketahanan mereka, dan mengurangi kerentanan mereka merupakan hal yang sangat penting (Faraz, 2017).

4. Partisipasi generasi muda dalam upaya mencapai kesetaraan gender

UN Women telah merancang *Strategic Note 2023-2027* yang merupakan strategi yang modern untuk melibatkan pemuda Pakistan baik laki-laki maupun perempuan. Ini melibatkan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, pengumpulan sumber daya, dan pemantauan serta evaluasi yang aktif. *UN Women* berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas lokal, dengan tujuan menggali pandangan yang beragam dari seluruh penjuru dunia (UN Women Pakistan, 2023).

Dengan melibatkan berbagai mitra masyarakat sipil, terutama organisasi pemuda dan entitas swasta yang dikelola oleh generasi muda, melalui serangkaian konsultasi baik secara daring maupun luring, *UN Women* mengumpulkan pandangan dari para ahli di lapangan (UN Women Pakistan, n.d). Tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan terhadap strategi pemuda dalam mencapai kesetaraan gender dalam badan pemuda dan sektor publik.

Di *National University of Sciences and Technology* (NUST), *UN Women* telah bekerja sama dengan *Centre for International Peace and Stability* (CIPS) melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk bekerja sama dalam meningkatkan operasi pemeliharaan perdamaian yang memperhatikan isu gender. Pakistan merupakan negara terbesar dan tertua dalam hal kontribusi pasukan perdamaian PBB. Pakistan telah berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia, dengan lebih dari 200.000 pasukan dikerahkan sejak tahun 1960 (UN Women, 2021). Melalui kolaborasi ini, keduanya akan memasukkan isu-isu gender sebagai bagian penting dalam modul pelatihan dan mendorong partisipasi perempuan dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian.

Pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Pakistan sepakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Pakistan melalui penandatanganan MoU, yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi perempuan,

mendorong kewirausahaan perempuan, dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan dalam ranah ekonomi dan bisnis. Dengan kerja sama ini, kedua negara dapat mencapai tujuan bersama yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. MoU ini menjadi landasan untuk kerja sama masa depan, potensi perjanjian, dan inisiatif kolaboratif lainnya, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi kekerasan berbasis gender dan memperkuat kesetaraan gender di Pakistan (Office of the United State Rate Representative, 2014).

5. Perencanaan tingkat nasional dan administrasi pemerintahan

UN Women mendukung pendanaan publik yang adil tentang kesetaraan gender, termasuk dalam implementasi anggaran untuk gender. Dengan kerja sama bersama pendukung kesetaraan gender, *UN Women* dapat memperkuat pengaruhnya dalam pengambilan keputusan publik dan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab. Di berbagai forum seperti Majelis Umum PBB, Komisi PBB mengenai Hak-Hak Perempuan, dan lainnya, peran penting *UN Women* adalah memperkuat kerangka kerja normatif yang mendukung pembiayaan kesetaraan gender serta meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas di sektor publik (UN Women, 2015). *UN Women* bermitra dengan Kementerian Keuangan, Perencanaan, dan bidang-bidang lainnya, bersama dengan pemerintah daerah, anggota parlemen, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga akademis.

Berdasarkan pada data dari *The Diplomatic Inside*, *UN Women* telah bermitra dengan *Soni Jawari Center for Public Policy GB* (SJCPP) untuk mendukung perempuan di Gilgit-Baltistan dalam mengembangkan kebijakan publik demi masa depan daerah tersebut (Urooj, 2022). Kolaborasi ini mendukung inisiatif pemerintah Gilgit-Baltistan dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan.

Selain itu, *UN Women* Pakistan telah bekerja sama dengan Otoritas Nasional Anti Terorisme Pakistan (NACTA) untuk memberikan pendidikan kepada pegawai pemerintah. NACTA merupakan lembaga utama pemerintah Pakistan dalam memerangi ekstremisme yang semakin meningkat melalui kebijakan-kebijakan dan, khususnya, melalui partisipasi pemuda dan perempuan (Urooj, 2022). Upaya ini bertujuan untuk mendukung peran perempuan dalam melawan ekstremisme dan mempromosikan perdamaian serta toleransi di kalangan perempuan dan pemuda.

Kolaborasi dengan NACTA merupakan bagian dari upaya *UN Women* yang lebih luas dalam bidang agama, budaya, keterlibatan politik perempuan, dan bidang lainnya (UN Women Asia and The Pacific, n.d). Program ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih damai di Pakistan dengan meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan.

6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Dengan mengadopsi SDGs sebagai agenda pembangunan nasional pada tahun 2016, Pakistan menunjukkan komitmennya terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Pakistan membuat kemajuan besar dengan memasukkan SDGs ke dalam kebijakan dan strategi nasional dan dengan membangun kerangka kerja institusional untuk melaksanakannya. Untuk mendukung implementasi dan pemantauan kemajuan SDGs, lembaga perencanaan di tingkat federal dan provinsi membentuk unit pendukung SDGs, yang dipimpin oleh lembaga perencanaan. Kerangka Kerja Nasional SDGs, yang disetujui oleh pemerintah pada tahun 2018, mencerminkan visi nasional dalam memprioritaskan dan mengadaptasi SDGs (United Nations Pakistan, n.d.). Selain itu, pemerintah Pakistan menyadari bahwa mencapai kesetaraan gender adalah hal yang sangat penting, sebagaimana halnya mencapai semua target SDGs, yang berjumlah 17. Mereka berkomitmen sepenuhnya untuk

mengatasi kesenjangan gender di Pakistan dengan mengoptimalkan potensi penuh tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan laporan tahunan program *UN Women* dan *UN Department of Economic and Social Affairs* (UN DESA), yang memberikan tinjauan mendalam tentang perkembangan kesetaraan gender dalam semua SDGs (UN Women, 2023), dinyatakan bahwa setengah perjalanan menuju akhir Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dunia gagal mencapai kesetaraan gender. Jika hal tersebut terus berlanjut, lebih dari 340 juta perempuan dan anak perempuan di dunia, termasuk di Pakistan, akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 (UN Women, 2023). Sementara waktu semakin berkurang, *UN Women* mendesak untuk bertindak.

Maka dari itu, *UN Women* melakukan tindakan prioritas untuk mempercepat kemajuan SDGs 5 (*No Poverty, Good Health and Well-being, Zero Hunger, Quality Education, and Gender Equality*) yaitu:

- a. Mencabut undang-undang negara anggota yang tidak adil dan memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang kuat yang mendukung kesetaraan gender. Parlemen Pakistan telah merancang undang-undang baru mengenai perlindungan terhadap pelecehan perempuan di tempat kerja, yang diperluas untuk mencakup tempat kerja formal dan informal serta mengikutsertakan pekerja rumah tangga dalam perlindungan. Definisi pelecehan juga diperluas untuk mencakup diskriminasi gender baik yang bersifat seksual maupun tidak. Undang-undang ini juga melindungi mahasiswa, menyederhanakan proses pengaduan, dan mencegah pembalasan (Ijaz, 2022).
- b. Mengatasi alasan mendasar di balik kekerasan berbasis gender dan memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki akses terhadap program lintas sektor yang berkualitas tinggi. Pemerintah Pakistan telah mengambil langkah konkret untuk menangani akar masalah kekerasan berbasis gender dan memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan

memiliki akses yang lebih baik ke program lintas sektor berkualitas tinggi. Sebagai contoh, mereka telah meluncurkan program *Girls' Education Initiative* yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan. Melalui penyediaan beasiswa, pembangunan sekolah baru, dan perbaikan fasilitas pendidikan, mereka bertujuan mengatasi ketimpangan dalam pendidikan gender (UNICEF, 2019). Dalam hal ini, *UN Women* berperan dalam membantu pemerintah Pakistan memberikan dukungan teknis dan sumber daya tambahan yang vital serta memperkuat upaya pemerintah Pakistan dalam memperbaiki akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan (UN Women, n.d.).

- c. Advokasi pembagian tugas pengasuhan dan rumah tangga yang tidak dibayar secara adil dan setara antargender. Salah satu contoh tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Pakistan adalah pembentukan Undang-Undang Perubahan Keluarga (*Family Courts Act*), yang diperkenalkan pada tahun 2019 (FindLaw, 2021). Dalam konteks Undang-Undang Perubahan Keluarga, *UN Women* memberikan dukungannya dalam penyusunan teks undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan di Pakistan. *UN Women* juga membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya undang-undang tersebut melalui kampanye informasi dan advokasi (UN Women, n.d.).
- d. Menjamin bahwa perempuan, yang mewakili latar belakang mereka yang beragam, memegang posisi kepemimpinan dan hadir dalam forum pengambilan keputusan. Pemerintah Pakistan telah bekerja sama dengan *UN Women* dalam upaya untuk memperjuangkan inklusi perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Melalui program *Women's Political Empowerment* yang didukung oleh *UN Women*, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum dan penunjukan perempuan dalam posisi

kunci dalam pemerintahan, seperti menteri dan anggota parlemen. Program ini mendorong partisipasi politik perempuan dengan menyediakan pelatihan, dukungan kampanye, dan sumber daya lainnya untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses politik. Kolaborasi antara pemerintah Pakistan dan *UN Women* dalam program ini menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan representasi dan pengaruh perempuan dalam forum pengambilan keputusan (Asia and the Pacific, UN Women, 2018).

- e. Memantau, menugaskan, dan memanfaatkan dana publik untuk penegakan peraturan dan kebijakan yang sensitif gender. Pemerintah Pakistan dan *UN Women* berkolaborasi dalam Konvensi Internasional *CSR Women* untuk memajukan ekonomi inklusif bagi perempuan. Mereka menerapkan *Women's Economic Empowerment Principles* (WEPs) sejak 2015, mengikuti ketentuan CEDAW, mengeluarkan undang-undang perlindungan perempuan, dan menandatangani MoU tentang kesetaraan gender. Mereka juga mendukung pembentukan kelompok pengembangan perempuan independen, menyediakan kios informasi di terminal bus tentang kekerasan dan hukum, serta mengadakan kampanye seperti 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Gender dan #StopJahezkhoori. *UN Women* berkolaborasi dengan NGO, IGO, dan sektor swasta seperti Foodpanda, UNOPS, dan LHRLA. Pada tahun 2018, Amandemen Undang-Undang Dana Wanita dalam Kesulitan dan Penahanan diperkenalkan untuk memberikan bantuan keuangan dan hukum kepada wanita di penjara atau yang mengalami kesulitan ekstrem di Pakistan (Astuti & Rodiah, 2023).
- f. Memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesehatan dan hak seksual dan reproduksi. Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (MNCH) di Pakistan adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu di daerah pedesaan. Melalui langkah-langkah

seperti meningkatkan akses terhadap pelayanan antenatal, mendorong pemberdayaan perempuan, mengatasi hambatan sosial budaya, dan memperbaiki infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan, program ini telah menghasilkan hasil positif yang signifikan. Di Kabupaten Burney, khususnya, terlihat peningkatan kesehatan ibu berkat upaya-upaya ini (Sarfraz & Hamid, 2016). *UN Women* juga berperan dalam mendukung implementasi yang efektif dari program MNCH ini. Mereka melakukan advokasi untuk memastikan hak-hak perempuan dan ibu terhadap pelayanan kesehatan yang layak dihormati dan dilindungi. Keterlibatan *UN Women* memberikan tambahan dukungan penting dalam memastikan kesuksesan program ini dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam hal pelayanan kesehatan (Sarfraz & Hamid, 2016).

- g. Memprioritaskan perempuan dan anak perempuan yang mengalami berbagai jenis diskriminasi, termasuk melalui investasi pada data dan penelitian serta analisis inovatif yang menyoroti kebutuhan spesifik mereka. Pemerintah Pakistan telah mengembangkan portal data gender yang menyediakan berbagai data dan analisis tentang isu-isu gender untuk membantu kebijakan yang berfokus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang mengalami diskriminasi. Hal ini memfasilitasi pengumpulan data dan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik mereka. Dalam hal ini, *UN Women* berkontribusi dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan untuk portal data gender, yang dapat membantu dalam identifikasi masalah dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak perempuan (UN Women, n.d.).

Poin-poin di atas merupakan beberapa upaya *UN Women* dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Pakistan (UN Women, 2023). Berbagai upaya tersebut membuktikan bahwa peran *UN Women* cukup efektif untuk mengurangi isu

ketidaksetaraan gender dan membantu para perempuan dan anak-anak di Pakistan. Banyaknya program yang disebutkan sedikit banyaknya membantu masyarakat Pakistan.

KESIMPULAN

Isu ketidaksetaraan gender di Pakistan adalah masalah yang struktural. Hal ini merupakan dampak dari tidak meratanya pembangunan yang berakibat pada aspek sosial ekonomi masyarakat Pakistan. Perempuan tidak diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Misalnya, mereka tidak mendapat akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Perekonomian dan sosial budaya menjadi alasan utama kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi perempuan. Keterbatasan dalam akses pendidikan menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada perempuan di Pakistan. Akibatnya, perempuan Pakistan rentan mengalami kekerasan dan sulit mengembangkan peluang ekonomi. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan perubahan karena berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, masalah ketidaksetaraan gender terus berlanjut.

UN Women, badan PBB yang berfokus pada isu gender, telah berperan penting dalam kampanye kesetaraan gender. Kerja sama antara *UN Women* dengan pemerintah Pakistan merupakan salah satu bentuk komitmen Pakistan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Program-program *UN Women* mendorong pemberdayaan perempuan dalam bentuk kegiatan pembangunan maupun di tingkat administratif dan hukum. Program-program *UN Women* melibatkan berbagai aspek, termasuk undang-undang, kebijakan, tindakan nyata, layanan masyarakat, dan pelaksanaan inisiatif tertentu. *UN Women* menjalankan program untuk meningkatkan kemandirian perempuan serta meningkatkan pemahaman perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, politik, dan

ekonomi. Program tersebut juga mencakup kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat yang menjangkau semua gender dari berbagai usia.

Beberapa kontribusi yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di Pakistan adalah dengan memberikan pendidikan yang setara di semua tingkat pendidikan. Dengan begitu, masyarakat Pakistan dapat menjadi individu yang mandiri dan berdaya. Selain itu, perlu adanya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, khususnya untuk generasi muda agar dapat mengubah sikap maupun norma yang telah berlaku secara sistemik di Pakistan. Selanjutnya, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi berupa perlindungan hukum bagi perempuan sehingga perempuan tidak lagi mendapat diskriminasi dan kekerasan dari lingkungannya.

BIBLIOGRAFI

- Ahmed, S. (2012) Violation of Woman Rights in Pakistan: A comparative study of News Reports of English and Urdu Newspapers. Asian Women. Retrieved January 25, 2024, from https://www.researchgate.net/profile/Shumaila-Ahmed/publication/308719678_Violation_of_Woman_Rights_in_Pakistan_A_comparative_study_of_News_Reports_of_English_and_Urdu_Newspapers/links/57ecb38f08ae93b7fa959c10/Violation-of-Woman-Rights-in-Pakistan-A-comparative-study-of-News-Reports-of-English-and-Urdu-Newspapers.pdf
- Ali, B. (2023, October 23). *Achieving UN Sustainable Development Goals 2030 in Pakistan: Challenges, Strategies, and Way Forward*. Institute of International Peace Leaders. Retrieved February 5, 2024, from <https://internationalpeaceleaders.com/achieving-un-sustainable-development-goals-2030-in-pakistan-challenges-strategies-and-way-forward/>
- Ali, T. S. (2022). *Perpetuation of gender discrimination in Pakistani society: results from a scoping review and qualitative study conducted in three provinces of Pakistan*. <https://bmcmwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-022-02011-6>
- Anees, M. S. (2023, May 25). *Where Are the Women in Pakistan's Politics?* The Diplomat. Retrieved January 26, 2024, from <https://thediplomat.com/2023/05/where-are-the-women-in-pakistans-politics/>
- Archer, C. (2001). *International Organization*. Routledge.

-
- Asia and the Pacific, UN Women. (2018). *Programme Brief: Women's Political Empowerment and Leadership | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific. Retrieved February 16, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/womens-political-empowerment-and-leadership>
- Astuti, S. P., & Rodiah, I. (2023). Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan dalam Kasus Patriarki di Pakistan. *EGALITA*, 18(1). Retrieved January 25, 2024, from <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/19159>
- Azizah, N., & Rahmawati, F. (2020). Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. Retrieved Oktober 9, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/358634893_Kekerasan_Berbasis_Gender_di_Pakistan
- BBC News Indonesia. (2013, July 12). *Di PBB Malala serukan hak pendidikan*. BBC. Retrieved September 29, 2023, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130712_pidato_malala_pbb
- Chairani, M. (2018). Hambatan dalam Implementasi CEDAW di Pakistan: Studi Kasus Honor Killing. *jil.7*(No. 1), hal. 144-145. <https://repository.unair.ac.id/69558/>
- Elashi, N. (2014). *Womens Political Participation Pakistan*. IKNOW Politics.
- Faraz, Z. (2017). Women, Peace, and Security in Pakistan. <https://www.usip.org/publications/2017/02/women-peace-and-security-pakistan>
- FindLaw. (2021). *New York Family Court Act - FCT | FindLaw*. Codes - FindLaw. Retrieved February 15, 2024, from <https://codes.findlaw.com/ny/family-court-act/>
- Gusmansyah, W. (2019, Juni). *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*. Retrieved Oktober 14, 2023, from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2233>
- Handoyo, K. K., & Rosyidin, M. (2020). Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip Cedaw Terhadap Kasus Honor Killing Di Pakistan. *Journal of International Relations*, 6(2), 230-237. Retrieved January 25, 2024 from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/27015>
- Haque, N. u., et al. (2021). *The State of Poverty in Pakistan. Pakistan Institute of Development Economics Report 2021*. Hal. 15. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/02/committee-elimination-discrimination-against-women-warns-against-uneven>
- Human Rights Watch. (1999). *Crime Or Custom? Crime Or Custom?* Retrieved January 26, 2024, from <https://www.hrw.org/reports/1999/pakistan/Pakhtml-04.htm>

-
- Ijaz, S. (2022, January 20). *Pakistan's New Law Aims to Protect Women in Workplace*. Human Rights Watch. Retrieved February 16, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2022/01/20/pakistans-new-law-aims-protect-women-workplace>
- International Growth Centre. (2021, Februari). Understanding gender barriers in the Pakistani labor market. <https://www.theigc.org/sites/default/files/2021/05/Jain-et-al-2021-Policy-brief.pdf>
- Kakal, T., Kok, M., & Jawad, M. (2023, September 29). "You are a child and this is not your business": Decision-making on child marriage in Sindh, Pakistan. Retrieved Januari 30, 2024, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10540960/#:~:text=As%20per%20the%20Child%20Marriage,in%20Sindh%20province%20%5B9%5D>.
- Khan, F. (2021, December 6). *Pakistan sees rise in gender-based violence during COVID-19*. The News International. Retrieved February 13, 2024, from <https://www.thenews.com.pk/latest/914582-pakistan-sees-a-rise-in-gender-based-violence-during-covid-19>
- Khan, S. (2013). Women: Pakistan's second-class citizens. Retrieved January 25, 2024, from <https://tribune.com.pk/story/584098/womenpakistans-second-class-citizens/>
- Koran Sindo. (2014). Perempuan Pakistan Tetap Bekerja meski Upah Minim. Retrieved January 25, 2024, from <https://nasional.sindonews.com/berita/935427/149/perempuan-pakistan-tetap-bekerja-meski-upah-minim>
- Kristina, M. D. (2013). Transformasi Sosial Gender dalam Konteks Feminisme Politik Negara Islam dalam Studi Kasus: Kepemimpinan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto.
- Kusman, D. A. (2022). Peran human rights watch dalam menangani isu pelanggaran hak asasi perempuan di pakistan tahun 2017-2021.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0267659114559116>
- Munir, M. M., Munir, M. H., & Rubaca, U. (2021). The Shadow Pandemic: Violence against Women in Pakistan during COVID-19 Lockdown. *Journal of International Women's Studies*, 22(5), 229–248
- National Gender Policy Framework. (2022, March 8). *Ministry of Planning, Development & Special Initiatives*. Ministry of Planning, Development & Special Initiatives. Retrieved October 19, 2023, from <https://www.pc.gov.pk/web/gender>

-
- NCSW. (2000). National Commission on the Status of Women. Retrieved January 27, 2024, from <https://ncsw.gov.pk/>
- Office of the United State Rate Representative. (2014, May 13). *United States and Pakistan Sign MOU on Women's Economic Empowerment and Announce Joint Action Plan on Improving Bilateral Trade and Investment Flows*. U.S. Trade Representative. Retrieved February 13, 2024, from <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2014/May/US-Pakistan-Sign-MOU-Women-Economic-Empowerment-Announce-Joint-Action-Plan-Trade>
- Office of the United State Rate Representative. (2014, May 13). *United States and Pakistan Sign MOU on Women's Economic Empowerment and Announce Joint Action Plan on Improving Bilateral Trade and Investment Flows*. U.S. Trade Representative. Retrieved February 13, 2024, from <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2014/May/US-Pakistan-Sign-MOU-Women-Economic-Empowerment-Announce-Joint-Action-Plan-Trade>
- Pakistan Government of Pakistan Ministry of Human Rights. (2022). *Information and Learning Material on Core Human Rights Conventions Ratified by Pakistan Government of Pakistan Ministry of Human Rights 2022*. Ministry of Human Rights. Retrieved February 1, 2024, from <https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/Information%20and%20Learning%20Material%20on%20Core%20Human%20Rights%20Convention.pdf>
- Pakistan Government. (2019). Pakistan: Annual Plan 2019 - 2020. Retrieved October 18, 2023, from <https://pc.gov.pk/uploads/annualplan/AnnualPlan2019-20.pdf>
- Pakistan Government. (2020). Pakistan: Annual Plan 2020- 2021. <https://pc.gov.pk/uploads/annualplan/AnnualPlan2020-21.pdf>
- Paynter, S. (2018, Juni). *The Girls of Our Future: Gender Inequality in Pakistan and China*. Vol.9. https://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/paynter_accessible.pdf
- Problem Hak Asasi Perempuan Di Pakistan Status Kaum Perempuan Di Pakistan Sangat Heterogen Karena Perkembangan Sosio-Eko*. (2019). UMY Repository. Retrieved January 25, 2024, from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28065/BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=6>
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Retrieved October 14, 2023, from <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1697303653&Signature=Izr3weK00Q3~xaCUQ->

TiyntXZ1jmOWDz99wP2owwRWYuixNhZCvWEE0ejKAKuP2eGtlbh31MBG
BmSb8g~rvM~InGMk

Retrieved January 25, 2024, from <https://www.iknowpolitics.org/en/discuss/opinion-pieces/womens-political-participation-pakistan>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulaimah, S. (2022). Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). Retrieved October 15, 2023, from <http://repository.unas.ac.id/6307/>

UN Women. Governance and national planning. Retrieved October 11, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning>

UN Women Asia Pacific (2022) Women as Active Agent of Peace : Inspiring Voices from Pakistan. Retrieved October 17, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/feature-story/2022/05/inspiring-voices-from-pakistan>

UN Women Indonesia and Yayasan Care Peduli. (2021). Program Cash-for-Work Empowers Women Affected by COVID-19. Retrieved October 17, 2023, from <https://indonesia.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2023/10/program-cash-for-work-empowers-women-affected-by-covid-19>

UN Women Pakistan (2023). Strategic Note 2023 - 2027. Retrieved October 17, 2023, from https://pakistan.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/strategic_note_final.pdf

UN Women. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved October 11, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development>

UN Women. (2009). *2009 | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific. Retrieved February 13, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/results-at-a-glance/2009>

UN Women. (2013). *About UN Women*. UN Women. Retrieved September 9, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

UN Women. (2013). *What we do: Economic empowerment*. UN Women. Retrieved February 10, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment>

-
- UN Women. (2015). *Pakistan determined that women will have central roles in political, economic and other spheres*. UN Women. Retrieved February 13, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/pakistan>
- UN Women. (2015). *Women' Leadership, Empowerment, Access And Protection In Crisis Response*. UN Women. Retrieved February 13, 2024, from https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/FPI%20Brief-LEAP_v5.pdf
- UN Women. (2019, July 16). *UN Women Pakistan launches Essential Services Package for social services for women and girls subject to violence in Pakistan*. UN Women Asia and the Pacific. Retrieved February 12, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/07/un-women-pakistan-launches-essential-services-package-for-social-services>
- UN Women. (2020). *Gendered Impact and Implications of COVID-19 in Pakistan*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gendered-impact-and-implications-of-covid-19-in-pakistan>
- UN Women. (2020). *UN Women Pakistan | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved October 19, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan>
- UN Women. (2020). *Women's economic empowerment | UN Women – Pakistan*. UN Women Pakistan. Retrieved February 11, 2024, from <https://pakistan.unwomen.org/en/our-work-pk/womens-economic-empowerment>
- UN Women. (2022, February 16). *Call for proposals: Women's economic empowerment in two districts of Punjab, Pakistan*. UN Women. Retrieved February 11, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/01/call-for-proposals-unw-ap-pak-cfp-2022-001-womens-economic-empowerment-in-punjab-pakistan>
- UN Women. (2022, February 16). *Call for proposals: Women's economic empowerment in two districts of Punjab, Pakistan*. UN Women. Retrieved February 11, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2022/01/call-for-proposals-unw-ap-pak-cfp-2022-001-womens-economic-empowerment-in-punjab-pakistan>
- UN Women. (2022). *Women, Peace and Security and Humanitarian Action | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific. Retrieved February 13, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/women-peace-and-security-and-humanitarian-action-in-pakistan>

-
- UN Women. (2023). National Report on The Status of Women in Pakistan, 2023. <https://pakistan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/07/national-report-on-the-status-of-women-in-pakistan-a-summary>
- UN Women. (2023). *Pakistan's international obligations on gender equality* | UN Women – Pakistan. UN Women Pakistan. Retrieved January 26, 2024, from <https://pakistan.unwomen.org/en/our-work-pk/pakistans-international-obligations-on-gender-equality>
- UN Women. (n.d.). *\$name*. UN Women Asia and the Pacific. Retrieved February 13, 2024, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/programmes>
- UN Women. (n.d.). *About UN Women*. UN Women. Retrieved February 7, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- UN Women. (n.d.). *Global database on Violence against Women*. UN Women Data Hub. Retrieved February 15, 2024, from <https://data.unwomen.org/evaw/database>
- UN Women. (n.d.). What we do: Ending violence against women. Retrieved October 7, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>
- UN Women. (n.d.). *What we do*. UN Women. Retrieved February 13, 2024, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do>
- UNDP. (1994, Januari). *Human Development Report 1994* | *Human Development Reports*. Human Development Reports. Retrieved September 29, 2023, from <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- UNHCR. (2020, February 12). Committee on the Elimination of Discrimination against Women warns against “uneven” application of policies and programmes in Pakistan.
- UNICEF. (2019). *Girls' education*. UNICEF. Retrieved February 15, 2024, from <https://www.unicef.org/education/girls-education>
- UNICEF. (2022, March 8). *Child Marriage Country Profile - Pakistan*. UNICEF. Retrieved October 16, 2023, from <https://www.unicef.org/pakistan/documents/child-marriage-country-profile-pakistan>
- UNICEF. (2023, June 1). *Child marriage - UNICEF Data*. UNICEF Data. Retrieved January 31, 2024, from <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. Retrieved October 15, from <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>

-
- United Nations Pakistan. (n.d.). *Sustainable Development Goals*. United Nations in Pakistan. Retrieved February 12, 2024, from <https://pakistan.un.org/en/sdgs>
- United Nations. (1993) Declaration on the Elimination of Violence against Women. Retrieved October 16, 2023, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>
- United Nations. (2019). Violence against women: Key facts. Retrieved October 16, 2023, from <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/violence-against-women/>
- United Nations. (n.d.). What is Human Security? Retrieved October 16, 2023, from <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>
- United Nations. (n.d). Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls Retrieved September 29, 2023, from <http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>
- UNODC. (2020, April 5). Gender and Pandemic Protecting Women In Times Of Covid-19. https://www.unodc.org/documents/pakistan//Advocacy_Brief_3_Gender_COVID-19-Sindh.pdf
- UNSDG. (2023). *UNSDG*. UN Statistics Division. Retrieved February 5, 2024, from <https://unstats.un.org/sdgs/dataportal>
- UNSDGS. (2019). *THE 17 GOALS | Sustainable Development*. Sustainable Development. Retrieved February 11, 2024, from <https://sdgs.un.org/goals>
- Uuroj, I. (2022) UN Women to emperor women in pakistan. The Diplomatics Insight. Retrieved October 16, 2023, from <https://thediomaticinsight.com/un-women-to-empower-women-in-pakistan/>
- What is patriarchy?* (2017). London Feminist Network. Retrieved October 5, 2023, from <http://londonfeministnetwork.org.uk/home/patriarchy>
- Woods, P. (2006). *Successful Writing for Qualitative Researchers*. Routledge.
- World Economic Forum. (2023, June 20). *Benchmarking gender gaps, 2023 - Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum. Retrieved September 29, 2023, from <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/full/benchmarking-gender-gaps-2023>
- World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/>
- Yusalia, H. (2014). Pengarusutamaan Gender (Pug). Wardah: No. XXVIII/ Th. XV/Desember 2014, 1, 195–201.